

STATISTIK INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI ACEH 2022



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH



STATISTIK INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI ACEH 2022

STATISTIK INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI ACEH 2022

No. ISSN : 2714-9641 Katalog BPS : 6104006.11 No. Publikasi : 11530.2302

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : 56 Halaman

Naskah:

Tim Statistik Ekonomi BPS Provinsi Aceh

Gambar Kulit:

Tim Statistik Ekonomi BPS Provinsi Aceh

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Industri Mikro dan Kecil Provinsi Aceh 2022 merupakan hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2022 (VIMK22) yang dilaksanakan pada bulan September 2022 dengan metode sampel. Publikasi ini menyajikan data tentang kegiatan usaha sektor industri manufaktur yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 - 19 orang, yang meliputi antara lain; banyaknya usaha industri mikro dan kecil, tenaga kerja, balas jasa pekerja, pengeluaran dan pendapatan, permodalan, kesulitan usaha, kemitraan usaha, penggunaan internet serta pemasaran usaha produksi industri dan mikro dan kecil di seluruh wilayah Aceh.

Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah maupun konsumen data. Selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan referensi untuk berbagai penelitian atau studi khusus yang berkaitan dengan industri mikro dan kecil.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi khususnya para responden, narasumber, serta tim yang telah menyelesaikan publikasi ini.

Banda Aceh, Desember 2023 KEPALA BPS PROVINSI ACEH

AHMADRISWAN NASUTION

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	i۱
DAFTAR TABEL	١
DAFTAR GRAFIK	٧
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PENJELASAN UMUM	2
A. Pendahuluan	2
B. Tujuan	2
C. Lingkup dan Cakupan	3
D. Dokumen yang Digunakan	3
E. Metodologi	4
F. Organisasi Lapangan	5
G. Konsep dan Definisi	6
ULASAN RINGKAS	17
A. Karakteristik Usaha IMK	17
B. Karakteristik Tenaga Kerja dan Balas Jasa	19
C. Karakteristik Pengusaha IMK	23
D. Karakteristik Kendala dan Pemasaran	25
LAMPIRAN TABEL	38

DAFTAR TABEL

		Halaman
1	Banyaknya Usaha dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja Tahun 2022	19
2	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2022	20
3	Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerja Tahun 2022	23
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2022	29
5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalin Kemitraan Tahun 2022	32
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Dampak Pandemi Covid-19 yang Dirasakan Tahun 2022	36
	hit Psillacehib Ps. S	
	2 3 4 5	Status Pekerja Tahun 2022

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Gambar 1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Industri (KBLI) Tahun 2022	18
Gambar 2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam Tahun 2022	20
Gambar 3	Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022	21
Gambar 4	Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2022	22
Gambar 5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2022	24
Gambar 6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2022	25
Gambar 7	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Tahun 2022	26
Gambar 8	Persentase Usaha Mikro Kecil menurut Sumber Modal Utama Tahun 2022	
Gambar 9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2022	27 28
Gambar 10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2022	_
Gambar 11	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalin Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2022	30 31
Gambar 12	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis	31
	Pelayanan/Bantuan yang Diterima Tahun 2022	32
Gambar 13	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan dari Koperasi Tahun 2022	33
Gambar 14	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Penggunaan Internet Tahun 2022	34
Gambar 15	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Konsumen Utama Tahun 2022	33
Gambar 16	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Strategi Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Tahun 2022	36

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Pekerja di Provinsi Aceh Tahun 2022	38
Tabel 2	Banyaknya Usaha, Pekerja, Pendapatan, Pengeluaran dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh Tahun 2022	38
Tabel 3	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari dan Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan di Provinsi Aceh Tahun 2022	39
Tabel 4	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2022	39
Tabel 5	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2022	40
Tabel 6	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikat yang ditamatkan di Provinsi Aceh Tahun 2022	40
Tabel 7	Banyaknya Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022	41
Tabel 8	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam di Provinsi Aceh Tahun 2022	41
Tabel 9	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besaran Pendapatan Setahun di Provinsi Aceh Tahun 2022	42
Tabel 10	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal di Provinsi Aceh Tahun 2022	42
Tabel 11	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Utama di Provinsi Aceh Tahun 2022	43
Tabel 12	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank di Provinsi Aceh Tahun 2022	43
Tabel 13	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2022	44
Tabel 14	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku di Provinsi Aceh Tahun 2022	44
Tabel 15	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalin Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2022	45

Tabel 16	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalin Kemitraan di Provinsi Aceh Tahun 2022	45
Tabel 17	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan/Bantuan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2022	46
Tabel 18	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan dari Koperasi di Provinsi Aceh Tahun 2022	46
Tabel 19	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Penggunaan Internet dan Tujuan Menggunakan Internet di Provinsi Aceh Tahun 2022	47
Tabel 20	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Konsumen Utama di Provinsi Aceh Tahun 2022	47
Tabel 21	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Terdampak Pandemi dan Dampak yang Dirasakan di Provinsi Aceh Tahun 2022	48
Tabel 22	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Strategi Menghadapi Dampak Pandemi di Provinsi Aceh Tahun 2022	48

PENJELASAN UMUM

hitiPs: Ilaceh in Ps. 196

PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja tanpa harus mensyaratkan jenjang pendidikan formal yang tinggi. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri, khususnya IMK cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Dalam era pasca krisis ekonomi dan otonomi daerah saat ini, pengumpulan data statistik IMK mempunyai arti yang sangat strategis. Data yang dihasilkan merupakan masukan yang sangat berguna untuk berbagai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya usaha IMK.

Pengumpulan data IMK mulai tahun 2009 dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pengumpulan data sebelumnya dilakukan hanya secara periodik melalui sensus atau survei. Pengumpulan data IMK dilaksanakan secara lengkap melalui sensus industri 1974/1975. Kemudian Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga (IKKR) tahun 1982, Sensus Ekonomi tahun 1986 (SE86), kemudian tahun 1991, 1993, 1994, dan 1995 melalui survei IKKR. Data IMK tahun 1996 dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi tahun 1996 (SE96) dan sejak tahun 1998-2005 data IMK dikumpulkan melalui Survei Usaha Terintegrasi (SUSI), sedangkan data IMK tahun 2006 dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi tahun 2006 (SE06).

Survei Industri Mikro dan Kecil 2022 (VIMK22) diselenggarakan untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK. Pendekatan pencacahan dalam VIMK22 sampel dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil.

B. Tujuan

Secara umum VIMK22 bertujuan untuk memberikan gambaran umum usaha IMK di Aceh selama tahun 2022 yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK22 mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat provinsi.

Secara khusus tujuan VIMK22 adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai informasi mengenai kegiatan ekonomi menurut dua digit KBLI, sebagai estimasi indikator IMK seperti:

- a. Jumlah usaha
- b. Pekerja dan balas jasa
- c. Keterangan usaha yang mencakup kendala dan pola kemitraan usaha
- d. Sumber permodalan
- e. Penggunaan internet
- f. Bimbingan dan pemasaran
- g. Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha IMK

C. Lingkup dan Cakupan

Survei IMK Tahunan 2022 ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota daerah potensi seluruh provinsi di indonesia dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 13.156 blok sensus dan mencakup 90.531 perusahaan/usaha mikro dan kecil. Untuk wilayah Aceh terpilih sebanyak 445 blok sensus yang mencakup 3.115 perusahaah/usaha mikro dan kecil untuk seluruh kabupaten/kota. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

D. Dokumen yang digunakan

Jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan untuk pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil 2022 serta kegunaannya sebagai berikut:

- 1. VIMK22-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus), digunakan untuk mengetahui identitas blok sensus terpilih.
- 2. **VIMK22-L2** (*Listing*), digunakan untuk pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.
- 3. VIMK22-DS2 (Daftar Sampel), digunakan untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah.
- 4. VIMK22-S2 (Sampel), digunakan untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih.
- 5. Buku pedoman teknis, pedoman pencacah, pedoman pemeriksaan/pengawasan, buku KBLI industri manufaktur, dan pedoman pengolahan.

E. Metodologi

1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam Survei Industri Mikro dan Kecil 2022 Tahunan (VIMK22 Tahunan) terdiri 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha.

- a) Kerangka sampel blok sensus digunakan untuk pemilihan sampel blok sensus. Kerangka sampel ini merupakan daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri pengolahan skala mikro dan kecil hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) beserta informasi penimbangnya. Blok sensus ini memuat usaha industri pengolahan skala mikro dan kecil dengan KBLI 2-digit, 10 s.d. 33 (blok sensus eligible).
- b) Kerangka sampel usaha/perusahaan IMK digunakan untuk pemilihan sampel usaha industri pengolahan skala mikro dan kecil. Kerangka sampel ini merupakan daftar usaha hasil pendaftaran (listing) usaha industri mikro dan kecil. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha industri mikro dan industri kecil.

2. Stratifikasi Blok Sensus

Stratifikasi blok sensus mencakup seluruh blok sensus pada kerangka sampel blok sensus dengan tujuan membentuk strata konsentrasi usaha berdasarkan jumlah relatif usaha industri pengolahan skala mikro dan kecil menurut jenis golongan pokok KBLI Tahun 2020 2-digit. Untuk setiap jenis usaha (KBLI 2-digit), strata konsentrasi adalah sekelompok blok sensus dengan komposisi usaha didominasi oleh jenis usaha tertentu. Stratifikasi blok sensus ini dilakukan pada level kabupaten.

3. Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan yaitu rancangan penarikan sampel dua tahap terstratifikasi.

Tahap pertama:

- Dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara probability proportional to size (PPS) dengan size banyaknya usaha IMK hasil pendaftaran (listing) usaha IMK pada kegiatan Sensus Ekonomi 2016. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan secara independent.
- Pengalokasian Usaha IMK per Kabupaten/Kota
 Pengalokasian jumlah usaha IMK per kabupaten/kota dilakukan oleh BPS
 Provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah IMK hasil listing per kabupaten/kota.

- a) Untuk target usaha industri kecil diperoleh dari komposisi IK pada hasil SE2016.
- b) Target sampel usaha industri mikro diperoleh dengan cara mengurangkan jumlah target sampel IMK provinsi dengan jumlah industri kecil (IK) untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Pengalokasian IM dilakukan dengan cara square root proporsional terhadap jumlah square root IM di masing-masing kabupaten/kota.
- c) Hasil alokasi IM dan IK per kabupaten/kota dikembalikan ke masing-masing kabupaten/kota untuk selanjutnya dilakukan pengalokasian menurut KBLI.

Tahap kedua: pengambilan sampel usaha di blok sensus.

- 1) Mengalokasikan target usaha ke dalam blok sensus terpilih.
- 2) Memilih sampel usaha IMK dengan cara sistematik.
- 3) Perusahaan/usaha yang terpilih tercetak ke Daftar Sampel VIMK-DS2 sebagai bekal petugas dalam melakukan pencacahan pada perusahaan/usaha tersebut.

F. Organisasi Lapangan

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan VIMK22, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan struktur organisasi lapangan yang penanggungjawab pelaksanaannya di daerah adalah Kepala Bidang Statistik Produksi dan sebagai *subject matter* adalah Subdit Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.

Petugas yang terkait dalam VIMK22 adalah:

- a. Petugas Pencacah Sampel (PCS) : Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Staf BPS/Mitra.
- b. Petugas Pemeriksa (PMS): Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Koordinator pelaksanaan di Kecamatan : KSK (aparat BPS pada tingkat kecamatan).
- d. Koordinator pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota: Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- e. Koordinator pelaksanaan di tingkat Provinsi : Kepala BPS Provinsi.

G. Konsep dan Definisi

Konsep definisi sangat diperlukan agar persepsi terhadap informasi yang dihasilkan tidak bias. Beberapa hal yang perlu didefinisikan dari kegiatan VIMK22.

- a. Industri manufaktur adalah kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri pengolahan (maklun).
- b. Perusahaan/usaha industri manufaktur adalah unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri pengolahan; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- c. Perusahaan/usaha jasa industri manufaktur adalah unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak perusahaan/usaha melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balas jasanya (maklun).
- d. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI yang digunakan dalam survei ini adalah sesuai Perka BPS Nomor 2 tahun 2020.
- **e. Industri mikro** adalah perusahaan industri manufaktur yang tenaga kerjanya antara 1-4 orang.
- **f. Industri kecil** adalah perusahaan industri manufaktur yang tenaga kerjanya antara 5-19 orang.
- **g. Kegiatan utama** yang dihasilkan usaha ini ditentukan berdasarkan:
 - Produk yang mempunyai nilai produk/jasa industri terbesar;
 - Jika nilai produk/jasa industri sama besar, maka kegiatan utamanya adalah produk yang menghasilkan barang/jasa dengan volume terbesar;
 - Jika nilai produk/jasa industri dan volume barang/jasa sama, maka kegiatan utamanya adalah produk yang menghasilkan barang/jasa dengan waktu terlama;

4) Jika nilai produk/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka kegiatan utamanya adalah ditentukan menurut **pengakuan** responden.

h. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

- 1) **Tidak tamat SD**: Tidak/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat setingkat Sekolah Dasar.
- 2) **SD & Sederajat :** Tamat setingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
- 3) **SMP & Sederajat**: Tamat Sekolah Menengah Pertama, baik yang umum maupun kejuruan, serta pendidikan yang setingkat SMP seperti: Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Pertanian Menengah Pertama.
- 4) **SMA/Madrasah Aliyah/Paket C:** Tamat dari Sekolah Menengah Atas, baik yang umum, serta jenjang pendidikan yang setingkat SMA seperti Madrasah Aliyah.
- 5) **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**: Tamat dari Sekolah Menengah Kejuruan setingkat SMA.
- 6) Diploma I/II/III: Tamat Diploma I atau Diploma II atau Diploma III pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta 1 atau Akta 2 atau Akta 3 termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I, Diploma II atau Diploma III. Pendidikan lainnya yang setara dengan DI/DII adalah SGO, SGPLB, PGSLP, PGA, PGTK, KPG, SAA, Sekolah Bidan. Pendidikan lainnya yang setara dengan DIII adalah Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda meski sudah sampai semester 8/9 dan belum tamat tetap dimasukkan sebagai tamat SMA.
- 7) **Diploma IV/S1**: Tamat program pendidikan Diploma 4 dan Sarjana (Strata-1).
- 8) **S2/S3**: Tamat program pendidikan pasca sarjana/doktor.
- i. Tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial adalah tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka yang ditulis tahun pada KBLI yang baru, dengan catatan:
 - 1) Bila terjadi perubahan KBLI-2 digit, maka tahun beroperasi adalah tahun KBLI tersebut berubah.

- 2) Suatu usaha yang merupakan cabang maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.
- 3) Apabila selama perjalanan usahanya suatu usaha pernah mengalami masa tidak beroperasi/tidak aktif (misal karena renovasi) maka tahun mulai beroperasi adalah tetap tahun yang lama.
- 4) Apabila suatu usaha/perusahaan mengalami perubahan kepemilikan maka tahun mulai beroperasi adalah tahun pemilik pertama menjalankan usahanya.

j. Pekerja

- 1) Pekerja tetap dibayar adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.
- 2) Pekerja tetap tidak dibayar adalah tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.
- 3) Pekerja produksi adalah tenaga kerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Misal: tenaga kerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.
- 4) Pekerja lainnya adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja ini biasanya sebagai tenaga kerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.
- **k. Balas jasa pekerja dibayar (dalam rupiah):** Balas jasa pekerja dibayar dibedakan upah pekerja tetap dan tidak tetap.
 - 1) Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
 - **2) Upah lembur** adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
 - 3) Hadiah adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini

- sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
- 4) Bonus adalah pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.
- **5) Tunjangan** adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.
- **I. Biaya/pengeluaran** adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan perusahaan/usaha meliputi:
 - **1) Bahan baku** adalah komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.
 - 2) Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.
 - 3) Bahan bakar adalah segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, seperti: bensin, solar, minyak tanah, LPG, batu bara/briket, kayu bakar, arang dan bahan bakar lainnya.
 - 4) Pelumas adalah zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya. Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan.
 - 5) Pemakaian Listrik adalah biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin.
 - **6) Pemakaian air** (yang bernilai ekonomis) adalah biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha.
 - **7) Angkutan/pengiriman, dan pos** adalah seluruh biaya pengangkutan, pengiriman, dan pos yang digunakan untuk kelancaran usaha.
 - 8) Telepon, internet dan komunikasi lainnya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan telepon, internet dan komunikasi lainnya termasuk pembelian pulsa atau paket data untuk

- kepentingan perusahaan.
- 9) Alat tulis dan keperluan kantor (ATK) adalah semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya (tidak termasuk sisa/stok yang belum digunakan).
- **10) Bunga atas pinjaman** adalah pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, misal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun 2012, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.
- 11) Sewa tanah atau bangunan untuk usaha adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha atas penggunaan tanah atau bangunan milik pihak lain.
- **12)** Sewa kendaraan, mesin, alat perlengkapan, dan barang modal lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk sewa kendaraan (tanpa operator), mesin, alat-alat perlengkapan (tanpa operator) dan barang modal lainnya.
- 13) Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal adalah pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.
- 14) Pajak tak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk restribusi papan nama, iklan, dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.
- 15) Kemasan, bahan pembungkus, dan pengepakan adalah semua bahan yang digunakan untuk pembungkus dan pengikat produk yang dihasilkan/barang dagangan yang dijual. Seperti: kertas pembungkus, kantong plastik termasuk kayu pengepak. Yang diisikan adalah nilai dari bahan-bahan yang telah digunakan, tidak termasuk sisa (stok) yang belum digunakan.
- **16) Jasa indsutri yang dikerjakan pihak lain adalah** seluruh pengeluaran atas jasa industri pihak lain yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan

untuk menunjang kegiatan usaha. Misalnya, biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan menjahit baju/konveksi yang diborongkan kepada pihak lain, pemotongan balok kayu yang dikerjakan pihak lain, dan lain-lain.

17) Jasa yang dikerjakan pihak lain adalah seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk kelancaran kegiatan/usaha. Misalnya pembayaran biaya jasa akuntan/konsultan, biaya untuk asuransi kerugian, biaya promosi/iklan, dll.

Pembayaran jasa lainnya adalah seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha ini seperti asuransi perusahaan, promosi/iklan, pengacara dll.

Biaya jasa akuntan/konsultan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/konsultan, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dll.

Biaya untuk asuransi kerugian adalah premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

Promosi/iklan adalah biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

Lainnya merupakan biaya yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk kelancaran dan menunjang kegiatan usaha. Contoh: royalti (merk dagang/hak paten), perijinan, pembelian peralatan penunjang kegiatan proses produksi yang umur pemakaiannya kurang dari setahun (misal: serokan/pengki, ayakan/saringan, pikulan, jarum jahit, wearpack, extra fooding dan sejenisnya), retribusi, juran, biaya sertifikasi, dsb.

m. Pendapatan

Pendapatan meliputi pendapatan utama, pendapatan dari jasa industri (maklun), pendapatan dari kegiatan lain, dan pendapatan lainnya.

1) Pendapatan dari produksi dan pendapatan dari jasa maklun: Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi).

- 2) Pendapatan dari kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha: Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bukan utama tapi masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.
 - a. **Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama**: selisih nilai jual dan beli dari barang-barang dalam bentuk yang sama (tanpa mengalami perubahan bentuk/tanpa diproses)
 - b. **Deviden:** pendapatan dari saham baik yang diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan di bursa efek.
 - c. **Hasil imputasi:** nilai pendapatan hasil imputasi bahan baku yang secara ril tidak dikeluarkan.
 - d. **Sumbangan, hibah, hadiah, dan sejenisnya:** nilai pendapatan berupa transfer dari pihak lain (sumbangan, hibah, hadiah dan sejenisnya).
- 3) Pendapatan lainnya: Pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha seperti bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, deviden, royalti/hak cipta dan sejenisnya yang diterima, dan transfer dari pihak lain (sumbangan dan hadiah).
- n. Sumber modal: Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap.
 Sumber modal dapat berasal dari:
 - 1) Milik sendiri: Merupakan harta milik perusahaan/usaha sendiri tanpa adanya kontribusi/partisipasi dari perusahaan/ usaha/ pihak lain. Untuk usaha yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dan orang tersebut ikut serta dalam pengelolaan usaha, dimasukkan sebagai modal sendiri.
 - 2) Pihak lain: Merupakan harta milik pihak lain, pengusaha tidak mempunyai kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain dalam IMK18 adalah bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya.
 - a. Bank: Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk melakukan kegiatan menerima, menyimpan, dan meminjamkan uang. Dalam hal tertentu untuk kemudian transaksi uang, bank juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan cek, atau surat berharga.
 - b. Koperasi : Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

- **c.** Lembaga keuangan bukan bank: Lembaga keuangan selain bank dan koperasi, seperti misalnya pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, anjak piutang (*factoring*), lembaga kredit (perorangan maupun perusahaan) dan sebagainya.
- **d. Modal ventura**: Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat/Bank Syariah.
- e. Keluarga/famili: Pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan saudara/famili, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan secara langsung adalah hubungan sedarah, sedangkan hubungan tidak langsung merupakan pertalian karena adanya perkawinan.
- f. Lainnya: Pihak lain yang bukan merupakan kegiatan bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keluarga dan pinjaman perorangan.

o. Kendala, kemitraan, dan bimbingan/pelatihan/penyuluhan

Bagian ini menjelaskan tentang kendala usaha pada tahun 2022, keanggotaan koperasi, kemitraan dan bimbingan usaha.

- 1) Kendala usaha: faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah usaha mencapai suatu tujuan usaha.
- 2) Kemitraan: hubungan kerjasama dengan usaha/perusahaan lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.
- 3) Bimbingan/pelatihan/penyuluhan: Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti pekerja (terhitung mulai dari usaha/perusahaan itu beroperasi secara komersial). Bimbingan/pelatihan/penyuluhan meliputi manajerial terkait dengan pengelolaan usaha, teknik produksi, pemasaran dan lainnya.
- **4) Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan usaha secara umum.
- 5) Bimbingan/pelatihan/penyuluhan keterampilan/teknik produksi: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam teknik produksi.
- 6) Bimbingan/penyuluhan pemasaran: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.

p. Sumber air

- 1) Air tanah: air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah.
- 2) Air kemasan/isi ulang: air dalam kemasan baik mempunyai merk dagang maupun tidak.
- 3) Usaha/perusahaan air minum/air baku: air yang diproduksi oleh perusahaan baik melalui jaringan pipa atau media penjualan air lainnya.
- **4) Sungai/danau/waduk:** jenis air dari permukaan tanah, termasuk kolam dan irigasi.

q. Internet dan pemasaran

Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringanjaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputerkomputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.

Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan atau menyebarluaskan suatu produk/barang atau jasa.

r. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease* 2019) di semua negara di seluruh dunia.

H. Data yang Disajikan

Data yang disajikan pada Publikasi Statistik Industri Mikro dan Kecil 2022 ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai Perka BPS Nomor 2 tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

а	a. Industri Makanan	KBLI: 10
t	o. Industri Minuman	KBLI: 11
C	. Industri Pengolahan Tembakau	KBLI: 12
C	d. Industri Tekstil	KBLI: 13
e	e. Industri Pakaian Jadi	KBLI: 14
f	. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	KBLI: 15
g	g. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak	KBLI: 16
	termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan,	
	Bambu dan sejenisnya.	
r	n. Industri Kertas dan barang dari Kertas	KBLI: 17
į.	. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	KBLI: 18
j.	. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	KBLI: 20
k	x. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat	KBLI: 21
	Tradisional	
I.	. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	KBLI: 22
r	n. Industri Barang Galian Bukan Logam	KBLI: 23
r	n. Industri Logam Dasar	KBLI: 24
C	o. Industri Barang Logam bukan Mesin dan -	KBLI: 25
	Peralatannya	

p.	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	KBLI: 26
q.	Industri Peralatan Listrik	KBLI: 27
r.	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (yang tidak	KBLI: 28
	termasuk lainnya)	
s.	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	KBLI: 29
t.	Industri Alat Angkut Lainnya	KBLI: 30
u.	Industri Furnitur	KBLI: 31
٧.	Industri Pengolahan Lainnya	KBLI: 32
w.	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan -	KBLI: 33
	Peralatannya	

https://aceh.bps.go.id

ULASAN RINGKAS

https://aceh.bps.do

ULASAN RINGKAS

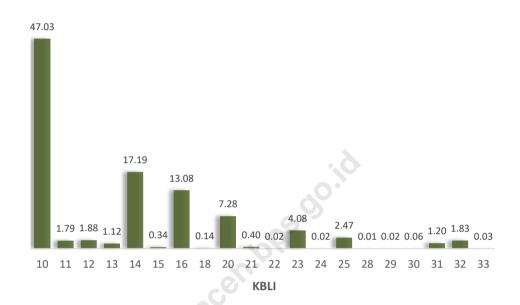
Pembangunan sektor industri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan sektor industri dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pada tahun 2022 sumbangan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Aceh memang belum memperlihatkan konstribusi yang besar, namun demikian Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu bagian dari sektor industri pengolahan yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di suatu daerah. Usaha IMK umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan kegiatan tempat tinggalnya, dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan, dan pengelolaan dapat segera diatasi.

A. Karakteristik Usaha IMK

Usaha Industri Mikro dan Kecil merupakan salah satu sektor usaha perekonomian rakyat yang menunjukkan perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil survei IMK tahunan 2022 jumlah usaha/perusahaan provinsi Aceh tercatat sebanyak 108 ribu usaha/perusahaan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, persentase usaha industri ini mengalami penurunan sekitar 4,23 persen dari jumlah total usaha IMK.

Usaha industri dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang dikategorikan sebagai Industri Mikro sedangkan usaha industri dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang dikategorikan sebagai Industri Kecil. Berdasarkan hasil Survei IMK Tahunan 2022 dapat dikatakan bahwa usaha industri mikro sangat mendominasi dibandingkan industri kecil dengan persentase mencapai 99,59 persen dari jumlah total usaha industri. Kondisi yang sama juga terjadi secara nasional dimana persentase usaha industri mikro mendominasi hingga 95,01 persen.

Gambar 1.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2022



Adapun kegiatan usaha industri yang paling banyak dijalankan diantaranya yaitu kelompok Industri Makanan (KBLI 10) sejumlah 51 ribu usaha/perusahaan atau mencapai 47,03 persen dari jenis kbli lainnya, baik skala industri mikro dengan jumlah pekerja 1-4 orang maupun industri kecil dengan pekerja 5-19 orang. Urutan kedua terbanyak yaitu Industri Pakaian Jadi (KBLI 14) dengan jumlah mencapai 18 ribu usaha/perusahaan atau sebesar 17,19 persen. Sementara industri dengan jenis kegiatan terbesar ketiga ditempati oleh kelompok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16) dengan jumlah 14 ribu usaha/perusahaan atau sebesar 13,08 persen. Selanjutnya urutan keempat dan kelima yaitu Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia dengan jumlah hampir mencapai 8 ribu usaha/perusahaan atau sebesar 7,28 persen dan Industri Barang Galian Bukan Logam (KBLI 23) sebanyak 4 ribu usaha/perusahaan atau sebesar 4,08 persen.

B. Karakteristik Tenaga Kerja dan Balas Jasa

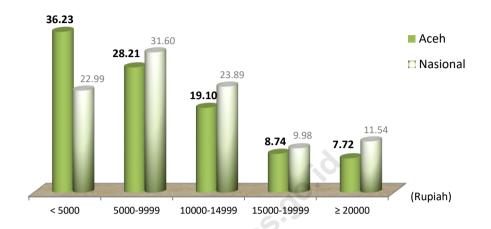
Sebagian besar tenaga kerja pada usaha Industri Mikro dan Kecil Tahun 2022 dilakukan oleh pekerja tidak dibayar (*unpaid workers*). Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, persentase tenaga kerja tidak dibayar lebih besar dari tenaga kerja dibayar yaitu lebih dari 71,92 persen dan selebihnya merupakan pekerja dibayar dari total tenaga kerja sebanyak 190 ribu orang. Begitu juga halnya dengan kondisi nasional, usaha IMK yang melibatkan pekerja dibayar persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan pekerja tidak dibayar. Dimana hanya sebanyak 32,84 persen pekerja dibayar, sedangkan selebihnya merupakan pemilik atau pekerja keluarga yang tidak dibayar.

Tabel 1. Banyaknya Usaha dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja Tahun 2022

Duovinsi	Banyaknya		Tenaga Kerja	
Provinsi	Usaha	Dibayar	Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108 498	41 064	136 621	177 685
%	2.50	23.11	76.89	100.00
Nasional	4 339 228	3 000 563	6 416 216	9 416 779
%	100	31.86	68.14	100.00

Penyerapan tenaga kerja IMK di Provinsi Aceh jika dibandingkan dengan angka nasional pada tahun 2022 adalah sebanyak 1,89 persen atau mencapai 177 ribu orang. Adapun penyerapan tenaga kerja ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari besarnya balas jasa pekerja memperlihatkan sebaran yang hampir sama antara usaha IMK di Aceh dan secara nasional. Persentase tertinggi adalah usaha dengan rata-rata upah pekerja dibawah lima ribu rupiah per jam (36,23 persen). Sedangkan persentase tertinggi untuk usaha IMK nasional berada pada nilai upah antara lima ribu hingga kurang dari sepuluh ribu rupiah per jam (31,60 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

Gambar 2.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam Tahun 2022



Jika dilihat dari jumlah hari kerja yang mendominasi adalah usaha dengan jumlah hari kerja 21 hingga 31 hari yaitu sebanyak 57,94 persen dengan rata-rata 7 jam kerja per hari. Begitu pula angka nasional sebagian besar usaha IMK berada pada rentang jumlah hari kerja maksimum dengan jam kerja rata-rata 7 jam per hari. Sedangkan usaha IMK dengan jumlah hari kerja 11-20 hari sebesar 26,69 persen dengan rata-rata jam kerja sebanyak 5 jam per hari dan jumlah hari kerja 1-10 hari sebesar 15,37 persen dengan rata-rata jam kerja sebanyak 6 jam per hari.

Tabel 2. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2022

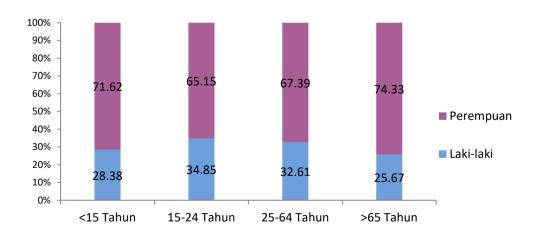
	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan					
Dunyingi	1-10		11-20		21-31	
Provinsi	Banyaknya	Rata2 Jam	Banyaknya	Rata2 Jam	Banyaknya	Rata2 Jam
	Usaha	Kerja/Hari	Usaha	Kerja/Hari	Usaha	Kerja/Hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	16 677	6	28 959	5	62 862	7
Nasional	526 845	6	1 003 830	6	2 808 553	7

Peran *gender* dalam usaha Industri Mikro Kecil sangatlah berpengaruh. Hal ini terlihat dari persentase pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Penyerapan pekerja perempuan hampir mencapai 120 ribu orang (67,53 persen) sedangkan pekerja laki-laki sebanyak 57 ribu orang (32,47 persen). Hal ini menunjukkkan bahwa kegiatan IMK mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja perempuan karena dapat dilakukan sebagai kegiatan sampingan dari kesibukan mengurus rumah tangga. Khususnya pada kelompok Industri Makanan (KBLI 10), Industri Pakaian Jadi (KBLI 14), serta Industri Kayu, Barang dari Kayu Dan Anyaman Bambu/Rotan (KBLI 16). Sehingga dapat dikatakan bahwa Industri Mikro dan Kecil bukan hanya menjadi kegiatan usaha utama bagi laki-laki, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh perempuan baik untuk menopang ekonomi rumah tangga ataupun usaha sampingan untuk membantu menambah penghasilan.

Dibandingkan dengan nasional, komposisi tenaga kerjanya berkebalikan dengan Aceh dimana persentase laki-laki sedikit lebih besar mencapai 51,27 persen dan pekerja perempuan sebesar 48,73 persen. Jika dilihat dari kelompok umur pekerja lebih dari 90 persen berada pada rentang usia produktif, yaitu berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun.

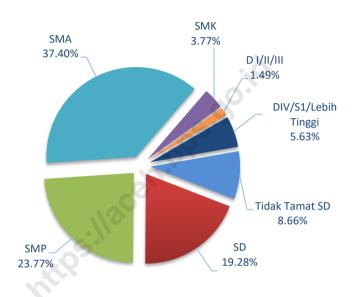
Gambar 3.

Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil
menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022



Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pekerja sebagian besar merupakan tamatan SMA dengan persentase 37,40 persen. Kemudian disusul oleh pekerja lulusan SMP (23,77 persen), lulusan SD (19,28 persen) bahkan terdapat juga pekerja tidak tamat SD dengan persentase 8,66 persen. Sedangkan lulusan Sarjana atau lebih tinggi hanya sebesar 5,63 persen saja.

Gambar 4.
Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2022



Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam usaha mikro dan kecil adalah pekerja tidak dibayar. Terdapat perbedaan komposisi pekerja menurut jenis kelamin terhadap statusnya sebagai pekerja dibayar dan tidak dibayar. Untuk pekerja dibayar, jumlah laki-laki lebih dominan dari pada perempuan sebanyak 20,3 ribu orang pekerja laki-laki (11,47 persen) dan 20,6 ribu orang pekerja perempuan (11,64 persen). Sedangkan pekerja perempuan tidak dibayar jumlahnya jauh lebih besar yaitu 99,3 ribu orang (55,89 persen) sedangkan pekerja laki-laki tidak dibayar 37,3 ribu orang (21,00 persen).

Secara nasional persentase tenaga kerja dibayar sebanyak 31,86 persen dan selebihnya merupakan pekerja tidak dibayar. Pekerja tidak dibayar ini biasanya merupakan pengusaha itu sendiri atau pemilik maupun pekerja keluarga. Jumlah pekerja perempuan tidak dibayar juga lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki,

dengan persentase sebesar 37,36 persen. Adapun pekerja laki-laki lebih mendominasi pada usaha IMK dengan status pekerja dibayar pada skala nasional, sedangkan di Aceh hampir seimbang jumlahnya.

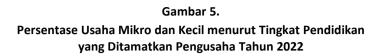
Tabel 3. Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerja Tahun 2022

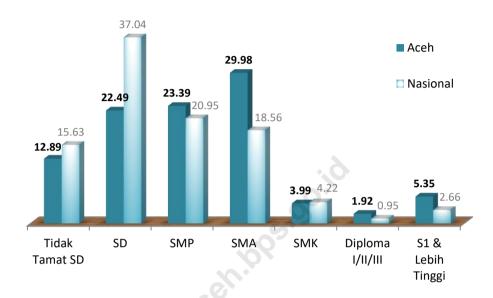
Provinsi	Jenis Kelamin	Pekerja Dibayar	Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	Laki-laki	11.47	21.00	32.47
	Perempuan	11.64	55.89	67.53
	Jumlah	23.11	76.89	100.00
Nasional	Laki-laki	20.49	30.78	51.27
	Perempuan	11.37	37.36	48.73
	Jumlah	31.86	68.14	100.00

C. Karakteristik Pengusaha IMK

Pendidikan merupakan salah satu peran dasar dalam menunjang produktivitas pengusaha. Secara umum berdasarkan hasil survei IMK tahun 2022 usaha IMK di Aceh mayoritas dikelola oleh pengusaha berpendidikan rendah. Dari sebanyak 108 ribu usaha IMK, sekitar 35,37 persen diantaranya dikelola oleh pengusaha berpendidikan SD kebawah. Akan tetapi mereka yang lulusan SMA juga tidak kalah bersaing dalam industri ini. Hal ini menunjukkan bahwa usaha IMK semakin diminati oleh bermacam kalangan tidak hanya mereka yang berpendidikan rendah. Sekitar 29,98 persen usaha dikelola oleh pengusaha berpendidikan SMA dan sebesar 23,39 persen dikelola pengusaha berpendidikan SMP/sederajat. Pada kondisi nasional usaha IMK dengan pendidikan yang ditamatkan pengusaha juga didominasi oleh lulusan SD ke bawah dengan persentase 52,66 persen. Sedangkan tamatan SMA/SMK persentasenya sebesar 22,78 persen.

Adapun pendidikan yang ditamatkan pengusaha pada tingkat Sarjana (S1 dan lebih tinggi) hanya sebesar 5,35 persen. Angka ini terlihat meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan angka nasional persentasenya lebih rendah yaitu hanya 2,66 persen.





Usaha IMK juga didominasi oleh pengusaha dengan kelompok umur produktif yaitu 25-64 tahun. Ini merupakan suatu kewajaran bila pada jenjang usia tersebut mengharuskan seseorang mempunyai penghasilan karena sudah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Umur 64 tahun dianggap umur maksimal dapat melakukan usaha, karena terkendala banyak hal diantaranya faktor kesehatan, kemampuan dalam mengingat dan sebagainya. Namun demikian masih ada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pada umur 65 tahun ke atas, meskipun persentasenya cukup kecil.

Berdasarkan kelompok umur pengusaha, sebagian besar usaha mikro kecil pengusahanya berada pada kelompok umur 25-64 tahun sebanyak 90,78 persen. Pengusaha lansia berusia 65 tahun ke atas juga turut mengambil andil dalam usaha industri ini sebesar 6,57 persen. Persentase terkecil adalah usaha dengan kelompok umur di bawah 25 tahun yaitu 2,65 persen. Selain itu angka nasional juga mencatat persentase usaha pada kelompok umur pengusaha 25-64 tahun turut pula mendominasi sebesar 90,32 persen. Pengusaha dengan kelompok umur dibawah 25 tahun persentasenya hanya 1,58 persen.

Gambar 6.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha
Tahun 2022

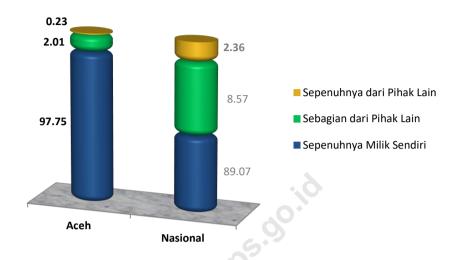


D. Karakteristik Kendala dan Pemasaran

Hal penting dalam melakukan kegiatan usaha adalah bagaimana pelaku usaha menyikapi permasalah atau kendala dan menciptakan prospek peluang usaha ke depan. Beberapa variabel yang dikumpulkan dalam survei IMK 2022 antara lain; sumber permodalan, kesulitan utama dalam menjalankan usaha, keikutsertaan dalam koperasi, kemitraan usaha, serta pemasaran hasil produksi.

Modal merupakan hal yang utama dipertimbangkan oleh para pengusaha. Sumber modal bisa berasal dari milik sendiri, patungan maupun pinjaman. Dalam menjalankan usaha IMK, modal yang dibutuhkan bukan hanya uang dalam nominal besar, akan tetapi modal uang seadanya, peralatan yang mendukung kegiatan usaha, serta tempat usaha yang masih bercampur dengan rumah tangga bisa menjadi pertimbangan. Ditinjau dari sumber modal (Gambar 7), terlihat bahwa usaha IMK sebagian besar sumber modalnya adalah milik sendiri dengan persentase lebih dari 97 persen dan dari pihak lain sebesar 2,25 persen. Cakupan secara nasional juga memperlihatkan angka cukup tinggi pada persentase usaha dengan sumber modal milik sendiri yaitu 89,07 persen dan selebihnya menggunakan modal dari pihak lain baik sebagian maupun sepenuhnya.



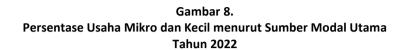


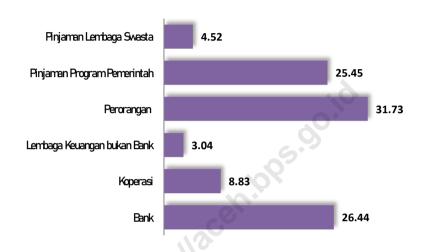
Meskipun banyak usaha IMK yang menggunakan sumber modal milik sendiri, akan tetapi sebagian pengusaha juga tetap melakukan pinjaman modal demi kelancaran dan meningkatkan usahanya. Ada beberapa sumber yang dijadikan tempat peminjaman utama oleh pengusaha untuk permodalannya, antara lain; bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, perorangan, pinjaman program pemerintah serta pinjaman lembaga swasta.

Terlihat dari hasil survei bahwa sumber modal dari pihak lain yang paling dominan adalah pinjaman perorangan mencapai 31,73 persen. Pinjaman ini tentu saja lebih mudah diperoleh tanpa syarat apapun dan lebih praktis. Meskipun demikian pinjaman bank menduduki persentase kedua tertinggi setelah pinjaman perorangan yaitu sebesar 26,44 persen. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari perubahan sistem transaksi keuangan di Aceh yang mengikuti ketentuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada seluruh lembaga keuangan termasuk bank. Berdasarkan prinsip syariah tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi pengusaha yang mengambil pinjaman, karena resiko yang lebih minim, tanpa bunga dan biaya administrasi, serta lebih sesuai dengan syariat islam.

Pinjaman program pemerintah di tahun 2022 cukup memberikan andil dalam permodalan usaha IMK. Berkebalikan dengan lembaga keuangan lain baik lembaga

keuangan bukan bank maupun lembaga swasta kurang diminati oleh pengusaha IMK. Begitupun pinjaman dari koperasi persentasenya cukup kecil yaitu 8,83 persen saja.





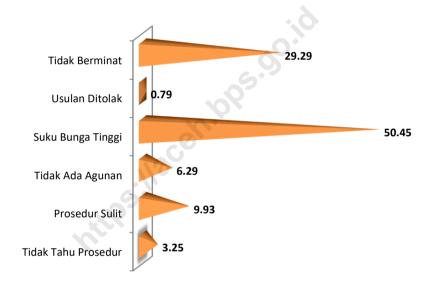
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program pemerintah untuk keberlangsungan usaha mikro kecil sudah dapat dirasakan oleh para pengusaha. Mengingat hampir tiga ribu pengusaha yang membutuhkan modal dari pihak lain karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi. Hal ini tentu saja menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pengusaha kecil dengan menyediakan program-program bantuan kewirausahaan.

Sementara itu sebagian pengusaha yang tidak mengambil pinjaman dari bank dikarenakan beberapa faktor tertentu. Alasan suku bunga tinggi menunjukkan angka paling tinggi dibandingkan alasan lainnya dengan persentase sebesar 50,45 persen. Kemudian disusul dengan alasan lain diantaranya tidak berminat (29,29 persen), prosedur sulit (9,93 persen), tidak ada agunan (6,29 persen). Sedangkan 3,25 persen menyebutkan tidak tahu prosedur, dan hanya sekitar 0,79 persen yang usulannya ditolak oleh pihak bank dalam mengambil pinjaman. Sedangkan angka nasional persentase cukup tinggi untuk pengusaha yang tidak berminat meminjam dari bank dengan alasan tidak berminat yaitu sebesar 52,90 persen.

Besarnya pinjaman bank oleh pengusaha bervariasi antara dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Jumlah pinjaman terbanyak berada pada interval 20 hingga 100 juta rupiah yang mencapai 54,74 persen. Pinjaman kurang dari 20 juta menempati posisi kedua dengan persentase sebesar 25,99 persen. Sedangkan sisanya melakukan pinjaman di atas 100 juta rupiah sebanyak 18,04 persen bahkan sampai dengan nominal 500 juta ke atas walau hanya sebesar 1,22 persen saja.

Gambar 9.

Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama
Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2022



Pada kegiatan usaha Industri Mikro dan Kecil terdapat kendala atau kesulitan dalam menjalankan usaha, baik dari segi permodalan, penyediaan bahan baku, pemasaran, persaingan dalam usaha, tenaga kerja bahkan cuaca dan lainnya. Total sebanyak 80,86 persen mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usaha. Jumlah ini sedikit menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana persentase yang mengalami kesulitan sebesar 85,45 persen.

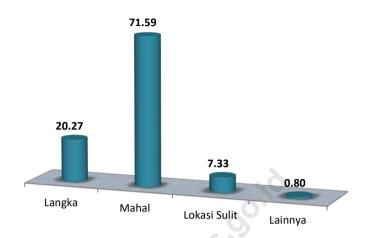
Tabel 4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2022

Jenis Kesulitan Utama	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Bahan Baku	20.37	21.80
Permodalan	41.86	32.60
Pemasaran	16.22	19.15
BBM/Energi	13.41	7.47
Infrastuktur	1.41	3.43
Tenaga Kerja	1.68	2.70
Cuaca	3.91	10.96
Lainnya	1.14	1.90
Mengalami Kesulitan	80.86	70.83
Tidak Mengalami Kesulitan	19.14	29.17

Kesulitan utama yang paling banyak dihadapi oleh pengusaha IMK adalah masalah permodalan. Hal ini mencerminkan bahwa usaha yang dijalankan dengan modal seadanya akan membuat usaha tersebut tidak bisa berkembang dengan maksimal. Sebanyak 41,86 persen usaha/perusahaan mengalami kendala dalam hal permodalan. Disusul oleh kesulitan dalam hal bahan baku sebesar 20,37 persen serta kendala pemasaran 16,22 persen. Sedangkan kesulitan lain seperti masalah BBM/energi, infrastruktur, tenaga kerja, cuaca dan lainnya memiliki persentase yang cukup kecil.

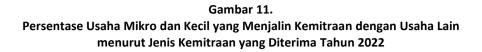
Ditinjau dari skala nasional masalah permodalan juga menjadi kendala utama dalam kegiatan usaha dengan persentase 32,60 persen. Selain itu pemasaran dan bahan baku juga menjadi kesulitan utama yang harus dihadapi oleh pengusaha karena mempengaruhi proses usaha industri.

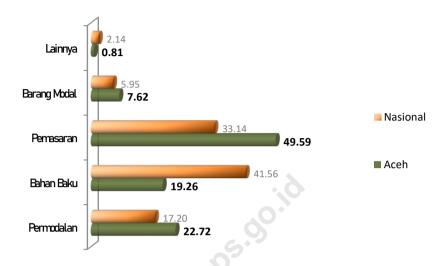
Gambar 10. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2022



Keberlangsungan usaha IMK sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku. Kesulitan bahan baku yang dihadapi pengusaha utamanya dikarenakan oleh harga bahan baku mahal, kelangkaan bahan baku, lokasi memperoleh bahan baku yang sulit atau jauh dan lainnya. Kebanyakan pengusaha mengeluhkan makin melonjaknya harga kebutuhan di pasaran khususnya bahan baku untuk menunjang kegiatan usaha mereka. Sebanyak 71,53 persen pengusaha merasakan harga bahan baku yang semakin mahal serta 20,27 persen mengalami kesulitan akibat kelangkaan bahan baku. Kelangkaan bahan baku artinya ketersediaan bahan baku utama jarang didapat, sulit ditemukan atau bahkan terkadang tidak ada. Selain itu, kesulitan bahan baku lainnya dikarenakan lokasi yang sulit sebesar 7,33 persen.

Terlihat bahwa sebagian besar pengusaha yang menyatakan mahalnya bahan baku adalah usaha IMK pada kelompok industri makanan (KBLI 10). Tentu saja ini berkaitan dengan semakin melonjaknya kebutuhan makanan pokok seiring berkembangnya waktu. Adapun yang menyatakan kesulitan bahan baku karena langka dan lokasi jauh adalah kelompok industri kerajinan kayu atau bahan-bahan dari kayu, anyaman dari bambu dan rotan maupun rumbia. Hal ini dapat menjadi masalah karena berdampak pada kenaikan harga produksi sehingga akan menjadi masalah baru dalam hal persaingan dengan usaha lainnya.





Untuk mengembangkan perusahaan diperlukan kemitraan dengan usaha lain. Kemitraan dapat berupa kerjasama dalam permodalan, penyediaan bahan baku atau pemasaran. Tahun 2022 persentase usaha IMK yang menjalin kemitraan dengan usaha lain sangat kecil yaitu 2,15 persen. Angka ini cukup menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,70 persen. Beberapa usaha yang menjalin kemitraan terutama dalam hal pemasaran menduduki peringkat teratas yakni sebesar 49,59 persen. Kemitraan dalam hal permodalan dan bahan baku menduduki urutan setelahnya. Sedangkan dalam hal barang modal persentasenya kurang dari sepuluh persen saja.

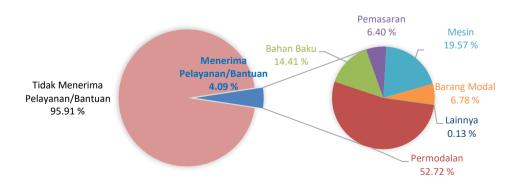
Begitu juga kondisi nasional persentase usaha IMK yang menjalin kemitraan dengan usaha lain juga mengalami penurunan menjadi 7,20 persen sedangkan sisanya tidak pernah menjalin kemitraan. Jenis kemitraan yang diterima terutama juga dalam hal bahan baku dan pemasaran. Adapun sebagian usaha yang menjalin kemitraan ini, didukung oleh beberapa badan/lembaga pemerintah, swasta dan lainnya. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalin Kemitraan Tahun 2022

Badan/Lembaga yang Menjalin Kemitraan	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Pemerintah Daerah	8.59	3.43
BUMN/BUMD	10.64	9.40
Swasta	7.54	23.27
Perbankan	4.63	3.49
Yayasan/LSM	2.20	1.67
Koperasi	9.63	4.79
Lainnya	56.77	53.95
Menjalin Kemitraan	2.15	7.20
Tidak Menjalin Kemitraan	97.85	92.80

Pada tahun 2022 badan atau lembaga yang berperan besar dalam hal kemitraan dengan usaha IMK adalah lembaga lainnya atau perorangan. Hal ini sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana BUMN/BUMD lebih berperan. Adapun peran pemerintah daerah sangat kecil bahkan tidak menyentuh angka sepuluh persen. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dan para pengusaha untuk mulai meningkatkan hubungan kemitraan sehingga dapat memberikan solusi maupun meringankan kesulitan para pelaku usaha. Adapun lembaga lain yang andil memberikan dalam kemitraan usaha IMK yaitu BUMN/BUMD sebesar 10,64 persen, disusul koperasi sebesar 9,63 persen. Sedangkan perusahaan swasta, perbankan dan yayasan/LSM hanya memiliki sedikit andil dalam kemitraan usaha IMK ini.

Gambar 12.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan/Bantuan yang Diterima dari Koperasi Tahun 2022



Meskipun hanya beberapa usaha mikro dan kecil yang menjalin kemitraan dengan koperasi, nyatanya terdapat sekitar 2,78 ribu pengusaha yang mendapat pelayanan/bantuan permodalan dari koperasi sedangkan beberapa lainnya mendapat pelayanan barang modal/peralatan, mesin, bahan baku, pemasaran dan lainnya. Selain itu pengusaha juga mendapat bimbingan/pelatihan/penyuluhan dari pemerintah maupun lembaga swasta. Akan tetapi hanya 2,99 persen pengusaha yang mengikuti bimbingan/pelatihan/penyuluhan baik tentang manajerial, ketrampilan dan tehnik produksi maupun pemasaran. Sedangkan sisanya belum penah mengikuti kegiatan sejenis itu.

Hal ini sangat disayangkan karena sebagian pengusaha hanya bermodalkan pengalaman seadanya atau bahkan menjalankan usaha tanpa ketrampilan dibidangnya. Tentu saja ini sedikitnya berpengaruh terhadap hasil barang yang diproduksi. Peran pemerintah harusnya bisa memfasilitasi lebih banyak kegiatan sejenis bimbingan/penyuluhan kepada pelaku usaha agar lebih maju baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam menghasilkan barang produksinya.

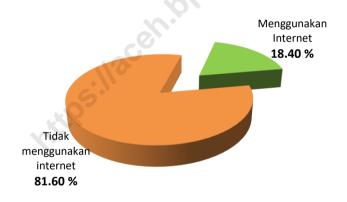
Gambar 13.

Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima
Pelayanan/Bantuan dari Koperasi Tahun 2022



Ketidaktahuan pengusaha akan bantuan dari badan/lembaga pemerintah maupun swasta umumnya dikarenakan terbatasnya informasi yang mereka peroleh. Minimnya pemanfaatan internet untuk melakukan akses konektivitas menjadi salah satu penyebab para pengusaha tidak mengetahui peluang tersedianya sarana kemitraan ataupun bantuan yang ditawarkan beberapa pihak. Di masa sekarang ini banyak pebisnis atau pengusaha besar yang memanfaatkan bantuan internet untuk memperoleh dan berbagi informasi apapun demi menunjang aktivitas usahanya. Namun demikian pada pelaku usaha IMK ternyata masih sangat minim dalam penggunaan internet baik dalam hal promosi/iklan penjualan, pemasaran produk, pembelian bahan baku, pencarian informasi maupun kegiatan operasional lain yang dapat dilakukan secara *online*.

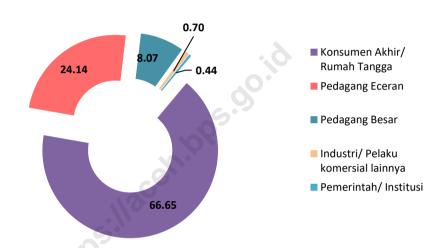
Gambar 14.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Penggunaan Internet
Tahun 2022



Salah satu faktor penting yang mendukung kemajuan suatu usaha industri adalah menentukan lokasi pemasaran yang tepat. Pemilihan lokasi pemasaran yang kurang tepat akan menghambat kelancaran usaha industri itu sendiri. Dengan jalinan kemitraan yang cukup terbatas, maka ruang lingkup pemasaran hasil produksi cenderung sempit. Untuk wilayah Aceh, lokasi pemasaran yang menjadi sasaran terbanyak adalah dalam satu kabupaten/kota yang mencapai 89,57 persen, kemudian luar kabupaten/kota satu provinsi sebanyak 9,22 persen. Sedangkan sisanya dipasarkan ke luar provinsi dan luar negeri dengan persentase masingmasing 0,78 persen dan 0,44 persen.

Produk yang dihasilkan dari usaha industri mikro dan kecil dipasarkan ke berbagai kalangan. Konsumen utama yang mendominasi hasil olahannya adalah rumah tangga dan pedagang sebagaimana terlihat pada gambar 15. Selain itu pelaku industri dan komersial lain serta pemerintah juga menjadi konsumen dalam pemanfaatan hasil olahan industri walau persentasenya kurang dari dua persen.

Gambar 15.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Konsumen Utama
Tahun 2022



Sejak merebaknya virus Covid-19 di awal tahun 2020 lalu, banyak usaha khususnya berskala mikro dan kecil mengalami penurunan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh pembatasan mobilitas yang mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bahkan *lockdown* di sebagian besar wilayah sehingga berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat terlebih pelaku usaha ekonomi. Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 58,87 persen pengusaha masih merasakan dampak pandemi Covid-19 baik dari faktor penurunan penjualan, kenaikan harga bahan baku dan lainnya.

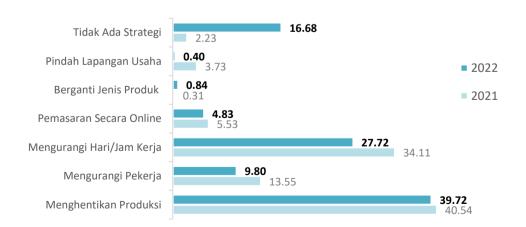
Dampak yang dirasakan oleh sebagian besar pengusaha yaitu penurunan penjualan atau berkurangnya permintaan pasar dengan persentase hampir mencapai 50 persen. Sedangkan selebihnya mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan bahan baku, masalah pekerja maupun penundaan pembayaran pembeli. Dengan adanya kendala seperti ini para pengusaha merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya dan dibutuhkan strategi lain untuk menghadapinya. Adapun sebagian besar pemilik usaha mengurangi hari maupun jam kerja selama pandemi,

tentu saja hal ini mengakibatkan penurunan omset usaha. Selain itu sebagian pengusaha juga mengurangi jumlah pekerja, beralih usaha bahkan sampai harus menghentikan produksi.

Tabel 6. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Dampak Pandemi Covid-19 yang Dirasakan Tahun 2022

Dampak yang Dirasakan	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Permintaan/Penjualan Menurun	42.15	51.20
Penundaan Pembayaran Pembeli	10.10	11.61
Bahan Baku Langka	8.37	10.22
Bahan Baku Mahal	32.49	22.77
Kehadiran Pekerja Berkurang	2.32	3.05
Lainnya	4.57	1.16
Terdampak Pandemi	58.87	61.14
Tidak Terdampak Pandemi	41.13	38.86

Gambar 16.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Strategi Menghadapi Dampak Pandemi
Covid-19 Tahun 2022



LAMPIRAN TABEL

https://aceh.bps.oc

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Pekerja di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table Number of Micro and Small Scale Establishment by Group of Workers in Aceh Province 2022

Provinsi			Jumlah				
Province	1	2-4	2-4 5-9 1		15-19	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Aceh	61 173	46 877	351	90	7	108 498	
Indonesia	1 912 196	2 210 673	112 355	84 789	19 215	4 339 228	

Tabel
Banyaknya Usaha, Pekerja, Pendapatan, Pengeluaran, dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh Tahun 2022

Number of Establishment, Workers, Revenue, Expenditure, and Compensation of Workers of Micro and Small Scale Establishment in Aceh Province 2022

Provinsi Province	Banyak- nya Usaha	Pekerja <i>Workers</i>			Pendapatan	Pengeluaran	Balas Jasa Pekerja	
	Number of Establish ment	Dibayar <i>Paid</i>	Tidak Dibayar <i>Unpaid</i>	Jumlah Total	Revenue (000 Rp)	Expenditure (000 Rp)	Compensation of Workers (000 Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Aceh	108 498	41 064	136 621	177 685	7 417 865 510	3 679 152 007	716 266 240	
Indonesia	4 339 228	3 000 563	6 416 216	9 416 779	521 495 844 588	288 434 465 005	58 466 315 180	

Tabel
Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari dan
Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan di Provinsi Aceh Tahun 2022
Number of Micro and Small Scale Establishment and Average of Working
Hour a Day by Working Day a Month in Aceh Province 2022

	Jumlah	Hari Kerja	a dalam Sebul	an / Work	ing Day a Mo	nth	Jumlah / Total		
	1 - 10		11 - 20		21 - 3	1	Julillali / Total		
Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Aceh	16 677	6	28 959	5	62 862	7	108 498	6	
Indonesia	526 845	6	1 003 830	6	2 484 732	7	4 339 228	7	

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table 4 Number of Micro and Small Scale Establishment by Level of Educational Attainment of Enterpreneurs in Aceh Province 2022

		Level of E	ducational A	ttaintment (of Enterprei	neurs		
Provinsi Province	Tidak Tamat SD Not Completed Elementary School	SD dan Sederajat Elementary School	SMP dan Sederajat Junior High School	SMA/MA/ Paket C Senior High School	SMK Vocational High School	Diploma I/II/ III Diploma I/II/ III	Diploma IV/Sarjana (S1) dan Lebih Tinggi University Degree	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	13 982	24 397	25 375	32 530	4 332	2 082	5 800	108 498
Indonesia	678 147	1 607 105	909 029	805 242	183 043	41 126	115 536	4 339 228

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table 5 Number of Micro and Small Scale Establishment by Age Group of Enterpreneurs in Aceh Province 2022

Provinsi <i>Province</i>		Kelompok Umur Pengusaha Age Group of Enterpreneurs							
Provinsi <i>Province</i>	< 20 20 - 24		25 - 44	45-64	65+	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			
Aceh	559	2 317	48 917	49 580	7 125	108 498			
Indonesia	8 724	60 053	1 677 903	2 241 489	351 059	4 339 228			

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pekerja di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table Number of Micro and Small Scale Establishments by Level of Educational Attaintment of Workers in Aceh Province 2022

			Tingkat Pe	endidikan	yang Dita	ımatkan P	ekerja /					
Provinsi		Level of Educational Attaintment of Workers										
Province	Tidak	SD					Diploma IV/	Jumlah				
	Tamat SD		SMP	SMA	SMK	DI/II/III	Sarjana/Lebih Tinggi	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
Aceh	15 380	34 253	42 234	66 462	6 701	2 646	10 009	177 685				
Indonesia	1 424 599	3 454 227	2 176 674	1 791 492	334 462	61 516	173 809	9 416 779				

Tabel Banyaknya Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022

Tabla 7

Table Number of Workers of Micro and Small Scale Establishments by Workers
Status and Sex in Aceh Province 2022

	Pel	kerja Dibaya	ar/	Peker	ja Tidak Dib	ayar /	Jumlah /			
	ı	Paid Worke	r	U	npaid Work	er		Total		
Provinsi Province	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan Female	Sub Jumlah Sub <i>Total</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan Female	Sub Jumlah Sub <i>Total</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan Female	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Aceh	20 376	20 688	41 064	37 312	99 309	136 621	57 688	119 997	177 685	
Indonesia	1 929 809	1 070 754	3 000 563	2 898 475	3 517 741	6 416 216	4 828 284	4 588 495	9 416 779	

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table 8 Number of Micro and Small Scale Establishments by Compensation of Paid Worker per Hour in Aceh Province 2022

Provinsi	Banyaknya Usaha	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Jam (Rupiah) Compensation of Paid Worker per Hour (Rupiahs)						
Province	Number of Establishment	Number of Establishment with Paid Worker	< 5000	5000-9999	10000-14999	15000-19999	> 20000		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Aceh	108 498	22 181	8 036	6 257	4 237	1 938	1 713		
Indonesia	4 339 228	1 132 396	260 358	357 867	270 490	113 058	130 623		

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besaran Pendapatan Setahun di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table 9 Number of Micro and Small Scale Establishments by Revenue Value on a Year in Aceh Province 2022

Besaran Pendapatan Setahun (Jutaaan Rupiah) Provinsi Revenue Value on a Year (Millions Rupiahs) Province										Jumlah
Province	< 5	5 - 9	10-24	25-49	50-99	100-999	1000-1999	2000- 15000	≥ 15000	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	9 189	14 503	30 818	22 694	16 203	14 452	403	236	-	108 498
Indonesia	430 892	555 077	928 118	779 445	681 924	886 417	50 612	26 107	636	4 339 228

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table 10 Number of Micro and Small Scale Establishments by Source of Capital in Aceh Province 2022

	.49	Sumber Modal Source <i>of Capital</i>		
Provinsi Province	Sepenuhnya Milik Senndiri Fully Owned	Sebahagian dari Pihak Lain Partially from Others	Sepenuhnya dari Pihak Lain Fully from Others	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	106 062	2 184	252	108 498
Indonesia	3 864 880	371 891	102 457	4 339 228

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Utama di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table Number of Micro and Small Scale Establishments by Source of Main Loan in Aceh Province 2022

		Sumber Modal Source of Capital		Sumber Modal Utama The Main Source of Capital						
Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establish ment	Sepenuhnya Milik Sendiri Fully Owned	Sebagian atau Sepenuhnya Pihak Lain <i>Others</i>	Bank <i>Bank</i>	Koperasi <i>Coopera-</i> tive	Lembaga Keuangan bukan Bank Non-Bank Financial Institution	Perorangan Individual	Pinjaman Program Pemerintah Government Program Loans	Pinjaman Lembaga Swasta Private Institutio n Loan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Aceh	108 498	106 062	2 436	644	215	74	773	620	110	
Indonesia	4 339 228	3 864 880	474 348	108 134	36 647	15 607	148 931	149 035	15 994	

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table

Number of Micro and Small Scale Establishments by Main Reason for Not Having Bank Loan in Aceh Province 2022

	Banyaknya Usaha yang Memanfaat-	Meminjam dari Bank	Tidak Meminjam dari Bank		Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Main Reason for Not Having Bank Loan							
Provinsi Province	kan Pinjaman Number of Establishment Having Loans	Having Bank Loans	Not Having Bank Loans	Tidak Tahu Caranya Not Knowing Procedure	Persyaratan Sulit Difficulty in Procedure	Tidak Ada Agunan Not Having Collateral	Suku Bunga Tinggi High Interest Rate	Usulan Ditolak Proposal Rejected	Tidak Berminat Not Interested			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
Aceh	2 436	654	1 782	58	177	112	899	14	522			
Indonesia	474 348	109 102	365 246	25 877	30 443	39 799	71 071	4 857	193 199			

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table 13 Number of Micro and Small Scale Establishments by Kind of Main Difficulties in Aceh Province 2022

Provinci	Banyaknya Tidak Usaha Mengalami Provinsi Musaha Mengalami Kesulita				Jenis Kesulitan Types of Difficulties							
Province	Number of Establish- ment	Kesulitan Not Having Difficulties	Having Difficulties	Bahan Baku <i>Raw</i> Materials	Pemodalan Capital	Pemasaran <i>Marketing</i>	Energi	Infrastru ktur Infrastruc ture	Tenaga Kerja <i>Labour</i>	Cuaca Weather	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Aceh	108 498	20 765	87 733	35 094	72 117	27 940	23 095	2 422	2 890	6 734	1 970	
Indonesia	4 339 228	1 265 857	3 073 371	1 206 542	1 804 550	1 059 831	413 691	189 316	149 316	606 878	105 305	

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table 14 Number of Micro and Small Scale Establishments by Kind of Main Difficulty of Raw Material in Aceh Province 2022

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Mengalami	Kesu	Mengalami Kesulitan Having Difficulties		Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Types of Main Difficulty of Raw Material			
Province	Number of Establishment	- · · · · · · · ·	Selain Bahan Baku Except Raw Material		Langka Scarcity	Mahal Expensive	Lokasi Sulit Difficult Location	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Aceh	108 498	20 765	52 639	35 094	7 114	25 124	2 574	282	
Indonesia	4 339 228	1 265 857	1 866 829	1 206 542	342 209	741 478	92 286	30 569	

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalin Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table Number of Micro and Small Scale Establishments Having Partnership by
Regency/Municipality and Types of Partnership Received in Aceh Province 2022

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Kemitraan	Menjalin Kemitraan Having Partnership	Permodalan <i>Capital</i>	Types of F Bahan Baku	itraan yang Partnership I Pemasaran Marketing	Received Barang	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	108 498	106 169	2 329	644	546	1 406	216	23
Indonesia	4 339 228	4 026 781	312 447	69 927	168 942	134 701	24 193	8 699

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalin Kemitraan di Provinsi Aceh Tahun 2022

16

Table Number of Micro and Small Scale Establishments by Organizer of Business Partnership in Aceh Province 2022

					Bada	n/Lembaga	yang Mer	njalin Kemiti	raan				
		Tidak			Organizer of Business Partnership								
Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establish ment	Havina	Having Partnership	Pemerintah daerah /Dinas/Kop erasi Local government	BUMN/ BUMD	Swasta Private	Perbankan <i>Bank</i>	Yayasan/ LSM Foundation/ NGO	Koperasi Cooperative	Lainnya Others			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)			
Aceh	108 498	106 169	2 329	230	285	202	124	59	258	1 521			
Indonesia	4 339 228	4 026 781	312 447	11 356	31 093	76 920	11 552	5 505	15 835	178 355			

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan/Bantuan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table 17 Number of Micro and Small Scale Establishments by Types of Services Received in Aceh Province 2022

	Banyaknya	Menerima Pelayanan Received Service		Jenis Pelayanan yang Diterima Setahun yang Lalu Types of Services Received a Year Ago						
Provinsi Province	Usaha Number of Establishment	Tidak <i>No</i>	Ya Yes	Permodalan <i>Capital</i>	Bahan Baku Raw Material s	Pemasaran Marketing	Mesin <i>Machine</i>	Barang Modal/Peral atan Capital Goods/Equip mens	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Aceh	108 498	104 059	4 439	2 778	759	337	1 031	357	7	
Indonesia	4 339 228	4 200 860	138 368	97 561	18 661	12 888	9 498	15 855	4 310	

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan dari Koperasi di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table Number of Micro and Small Scale Establishments by Reason for Not Receivir

Table Number of Micro and Small Scale Establishments by Reason for Not Receiving Assistanship in Aceh Province 2022

	Dagualiana	Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan Reason for Not Receiving Assistanship								
Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Tahu Prosedur Not Knowing the Procedur	Proposal Ditolak Proposal Rejected	Tidak Berminat <i>Not</i> Interested	Tidak Tahu Not Knowing	Belum Ada Koperasi No Cooperative	Lainnya Others			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
Aceh	108 498	27 681	4 559	18 942	30 632	20 830	1 415			
Indonesia	4 339 228	1 152 263	77 293	749 280	1 388 938	734 513	98 573			

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan menurut Penggunaan Internet dan Tujuan Menggunakan Internet di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table Number of Micro and Small Scale Establishments by Using Internet and The Purpose of Using The Internet in Aceh Province 2022

		Tidak	Mengguna	Tujuan Menggunakan Internet The Purpose of Using The Internet						
Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Menggunakan Internet Not Using Internet	kan Internet Using Internet	Promosi/Iklan Penjualan Promotion/ Advertising	Pemasaran/ Penjualan Produk Marketing/ Product Sale	Pembelian	Pinjaman Fintech	Pencarian Informasi Information		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
Aceh	108 498	88 529	19 969	14 437	10 527	2 918	4	3 896		
Indonesia	4 339 228	3 125 725	1 213 503	584 315	910 154	459 180	8 968	224 219		

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Konsumen Utama di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table Number of Micro and Small Scale Establishments by Main Consumer in Aceh Province 2022

	Doministration	Konsumen Utama Main Costumer							
Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Konsumen Akhir (Rumah Tangga) Household	Pedagang Eceran Retailers	Pedagang Besar Distributors	Industri/ Pelaku Komersial Lainnya Industries/Other Commercial Business	Pemerintah/ Institusi Government/ Institution			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Aceh	108 498	72 317	26 191	8 756	755	479			
Indonesia	4 339 228	2 001 602	913 495	1 207 120	196 380	20 631			

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Terdampak Pandemi dan Dampak yang Dirasakan di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table

Number of Micro and Small Scale Establishments Impacted by Pandemic and Impacte Received in Aceh Province 2022

		Tidak Terdampak		Dampak yang Dirasakan Impact Received						
Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Pandemi <i>Not</i>	Pandemi Impacted by	/Penjualan	Penundaan Pembayaran Pembeli Buyer Payment Delay	I Bahan	Bahan Baku Mahal Expensive Raw Material	Kehadiran Pekerja Berkurang Reduced Worker Attendance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
Aceh	108 498	44 624	63 874	49 423	11 840	9 816	38 096	2 726	5 357	
Indonesia	4 339 228	1 686 159	2 653 069	2 336 332	529 564	466 361	1 038 928	139 026	52 992	

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Strategi Menghadapi Dampak Pandemi di Provinsi Aceh Tahun 2022

Table Number of Micro and Small Scale Establishments by Strategies for Facing the Impacte of a Pandemic in Aceh Province 2022

Provinsi Province	Terdampak Pandemi Impacted by Pandemic	Strategi Menghadapi Dampak Pandemi Strategies for Facing the Impact of a Pandemic						
		Menghentikan Produksi Demand Drops	Menguran gi Pekerja Buyer Payment Delay	IVIENGIITANGI		Berganti Jenis Produk Changing Product Type	Usaha	Tidak Ada Starategi No Strategy
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Aceh	63 874	37 269	9 201	26 015	4 531	791	380	15 654
Indonesia	2 653 069	1 652 736	371 759	1 029 788	249 221	35 174	34 182	424 764

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh 23121

Telp : (065) 23005 Fax : (0651) 33632 Email : bps1100@bps.go.id Homepage : aceh.bps.go.id